

## Diakonia Transformatif: Kepemimpinan Kristiani sebagai Praksis Pemberdayaan Komunitas dalam Horizon Eklesiologi Publik

Linda Arih Ersada

Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, Tangerang

Correspondence: [lindasitepu23@gmail.com](mailto:lindasitepu23@gmail.com)

### Abstract

*The reduction of diakonia to sporadic charitable practices has eroded the transformative power of Christian leadership in contemporary Indonesia. This article offers a theological framework of “transformative diakonia” as a leadership paradigm that empowers communities within the horizon of public ecclesiology. Integrating John N. Collins’ reinterpretation of  $\delta\iota\alpha\kappa\omicron\nu\iota\alpha$  as a prophetic mission with liberation theology and contemporary public theology, this article argues that authentic Christian leadership does not lie in secular transformational models adopted without theological refinement but rather in a diaconal mode that positions the community as the subject, not the object, of transformation. Richard Osmer’s theology of praxis is employed to construct the argument. Four stages of discussion are developed: the genealogy of transformative diakonia, leadership as a diaconal mode, empowerment from the charitable to the structural, and the horizon of public ecclesiology. The contribution of this article lies in the formulation of a theological foundation that liberates Christian leadership from secular managerial borrowings while offering an empowerment praxis rooted in the perichoretic Trinity and directed toward Indonesia’s pluralistic public sphere.*

**Keywords:** *Christian leadership; community empowerment; public ecclesiology; practical theology; transformative diakonia*

### Abstrak

Reduksi diakonia menjadi praktik karitatif yang sporadis telah menggerus daya transformatif kepemimpinan Kristiani di Indonesia kontemporer. Artikel ini menawarkan kerangka teologis “diakonia transformatif” sebagai gramatika kepemimpinan yang memberdayakan komunitas dalam horizon eklesiologi publik. Mengintegrasikan pembacaan ulang John N. Collins atas  $\delta\iota\alpha\kappa\omicron\nu\iota\alpha$  sebagai pengutusan profetis dengan teologi pembebasan dan teologi publik kontemporer, artikel ini berargumen bahwa kepemimpinan Kristiani yang autentik tidak terletak pada model transformasional sekuler yang diadopsi tanpa pemurnian teologis, melainkan pada modus diakonal yang menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan objek, transformasi. Pendekatan teologi praksis Richard Osmer digunakan untuk menyusun argumen. Empat tahap pembahasan dikembangkan: genealogi diakonia transformatif, kepemimpinan sebagai modus diakonal, pemberdayaan dari karitatif ke struktural, dan horizon eklesiologi publik. Kontribusi artikel ini terletak pada perumusan landasan teologis yang membebaskan kepemimpinan Kristiani dari pinjaman manajerial sekuler sekaligus menawarkan praksis pemberdayaan yang berakar pada Trinitas perikoretis dan ditujukan pada ruang publik plural Indonesia.

**Kata Kunci:** diakonia transformatif; eklesiologi publik; kepemimpinan Kristiani; pemberdayaan komunitas; teologi praksis

## PENDAHULUAN

Krisis kepemimpinan Kristiani di Indonesia kontemporer bukanlah krisis kompetensi teknis, melainkan krisis gramatika teologis. Lembaga-lembaga gerejawi dan organisasi pelayanan Kristen telah melengkapi diri dengan kosakata manajerial: visi-misi, indikator

kinerja, branding, dan perencanaan suksesi kepemimpinan yang dipinjam dari dunia korporasi tanpa pemurnian teologis yang memadai.<sup>1</sup> Sementara itu, fungsi diakonal gereja, yang sejatinya merupakan modus eksistensi kristologis komunitas iman, kerap direduksi menjadi rangkaian aksi karitatif insidental: pembagian sembako, kunjungan jenazah, dan donasi bencana. Reduksi semacam ini tidak hanya mendangkalkan teologi pelayanan, tetapi juga mengabsahkan asimetri kuasa antara “yang melayani” dan “yang dilayani,” yang justru bertentangan dengan logika dasar Injil tentang kerendahan diri yang transformatif.

Persoalan menjadi lebih akut ketika wacana kepemimpinan transformasional, sebagaimana dirumuskan James MacGregor Burns dan dikembangkan Bernard Bass, diadopsi luas oleh seminari, sinode, dan berbagai organisasi kerohanian Indonesia tanpa kritik teologis yang memadai.<sup>2</sup> Model transformasional menjanjikan peningkatan moral pemimpin dan pengikut menuju cita-cita lebih tinggi, namun gramatika dasarnya tetap bersifat instrumental: pemimpin adalah agen yang “menggerakkan” pengikut, dan pengikut tetap berada dalam posisi sasaran intervensi. Adopsi model ini ke dalam ekosistem gereja menghasilkan paradoks yang janggal: bahasa pelayanan dengan struktur kekuasaan korporat, serta retorika hamba dengan praksis sentralisasi.

Di sisi lain, gerakan komunitas akar rumput di Indonesia, mulai dari pendampingan masyarakat adat di Kalimantan dan Papua, advokasi buruh migran di kawasan Asia Pasifik, hingga gerakan ekoteologi di komunitas pegunungan dan pesisir, menunjukkan vitalitas praksis kepemimpinan yang justru memberdayakan komunitas sebagai subjek perubahan.<sup>3</sup> Praksis-praksis ini belum cukup terbingkai secara teologis dalam wacana akademik arus utama Indonesia. Akibatnya, terdapat jurang signifikan antara teologi kepemimpinan yang diajarkan di seminari dan teologi kepemimpinan yang sesungguhnya dipraktikkan di akar rumput.

Tradisi diakonia sendiri telah mengalami pergeseran konseptual yang signifikan dalam tiga dekade terakhir. Pembacaan ulang John N. Collins atas teks-teks Perjanjian Baru menunjukkan bahwa diakonia tidak terutama berarti “pelayanan rendahan,” melainkan “utusan yang diberi mandat,” yaitu pengutusan dengan otoritas dan mandat profetis.<sup>4</sup> Pembacaan ini membuka jalan bagi rumusan “diakonia yang membebaskan” yang dikembangkan Kjell Nordstokke dan para teolog Federasi Lutheran Sedunia, di mana diakonia dipahami sebagai partisipasi dalam karya Allah yang membebaskan, bukan sekadar filantropi dari atas ke bawah.<sup>5</sup> Pergeseran konseptual ini menuntut rekonstruksi paralel atas konsep kepemimpinan Kristiani yang, sayangnya, dalam konteks Indonesia, belum cukup ditelusuri secara sistematis.

<sup>1</sup> Andrew Root, *Faith Formation in a Secular Age: Responding to the Church's Obsession with Youthfulness* (Grand Rapids: Baker Academic, 2017), 32–35.

<sup>2</sup> James MacGregor Burns, *Leadership* (New York: Harper & Row, 1978), 4, 19–20; Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Transformational Leadership*, edisi ke-2 (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), 3–5.

<sup>3</sup> Limi Mokodompit, *Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan dalam Masyarakat Adat Papua (Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua) = Industrialization Dynamics: Leadership Transformation in Papua Indigenous Society (Case Study: Kamoro Mimika Tribe, Papua Province)* (diss., Universitas Hasanuddin, 2024).

<sup>4</sup> John N. Collins, *Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources* (Oxford: Oxford University Press, 1990), 195–200.

<sup>5</sup> Kjell Nordstokke, ed., *Liberating Diakonia* (Trondheim: Tapir Academic Press, 2011), 12–17.

Tinjauan atas literatur Indonesia kontemporer menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Kajian tentang kepemimpinan Kristiani sebagian besar masih bergerak dalam paradigma transformasional atau kepemimpinan hamba yang dimodifikasi dengan teks-teks alkitabiah secara homiletis, tanpa pemurnian metodologis-teologis yang mendalam. Sebaliknya, kajian tentang diakonia cenderung terbatas pada dimensi historis-dogmatis, jarang dihubungkan secara konstruktif dengan teori kepemimpinan kontemporer dan praksis pemberdayaan. Sementara teologi publik Indonesia, meskipun berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, masih jarang menjembatani isu eklesiologi diakonal dengan praksis pemberdayaan komunitas dalam ruang publik plural.<sup>6</sup> Kerangka teoretis yang mengintegrasikan ketiga ranah: diakonia, kepemimpinan, dan pemberdayaan publik, dalam satu argumen koheren masih amat langka, dan itulah ruang yang hendak diisi artikel ini.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, tujuan artikel ini adalah merumuskan kerangka teologis “diakonia transformatif” sebagai gramatika kepemimpinan Kristiani yang memberdayakan komunitas dalam horizon eklesiologi publik. Rumusan ini bertujuan ganda: di satu sisi memurnikan wacana kepemimpinan Kristiani dari pinjaman manajerial sekuler yang diadopsi tanpa kritik, dan di sisi lain menawarkan landasan teologis bagi praksis pemberdayaan struktural yang telah dijalankan di akar rumput namun belum cukup terbingkai secara akademis.

Artikel ini disusun dalam empat bagian pembahasan setelah penjelasan metodologis. Bagian pertama menelusuri genealogi konsep diakonia transformatif dan membongkar reduksi karitatif yang dominan. Bagian kedua merumuskan kepemimpinan Kristiani sebagai modus diakonal, dengan mengkritisi model-model kepemimpinan yang dominan dalam literatur Indonesia. Bagian ketiga menggali konsep pemberdayaan komunitas dan memetakan pergeseran dari pendekatan karitatif ke pendekatan struktural. Bagian keempat memproyeksikan horizon eklesiologi publik sebagai konteks definitif praksis diakonia transformatif di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi teologi praksis-konstruktif sebagaimana dirumuskan Richard Osmer dalam empat tugas inti: deskriptif-empiris (apa yang sedang terjadi?), interpretatif (mengapa hal itu terjadi?), normatif (apa yang seharusnya terjadi?), dan pragmatik (bagaimana kita meresponsnya?).<sup>7</sup> Tahap deskriptif dilakukan dengan memetakan praktik kepemimpinan Kristiani dan diakonia di Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam literatur akademik. Tahap interpretatif menggunakan dialog teks-tradisi-konteks untuk menelusuri akar konseptual dan distorsi yang terjadi. Tahap normatif merumuskan kerangka teologis “diakonia transformatif” dengan mengintegrasikan pembacaan ulang Collins atas diakonia, teologi pembebasan, dan teologi publik kontemporer. Tahap pragmatik menjabarkan implikasi praktis bagi praksis kepemimpinan dan pemberdayaan komunitas horizon eklesiologi publik Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer berupa karya-karya teolog kontemporer yang membangun wacana diakonia dan kepemimpinan, khususnya Collins, Nordstokke, Volf, Moltmann, Bevans, Bretherton, dan Kärkkäinen, serta litera-

<sup>6</sup> Binsar Jonathan Pakpahan, *God Remembers: Towards a Theology of Remembrance as a Basis of Reconciliation in Communal Conflict* (Amsterdam: VU University, 2012) 141-142.

<sup>7</sup> Richard R. Osmer, *Practical Theology: An Introduction* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 4-7.

tur sekunder berupa artikel jurnal teologi bereputasi yang merefleksikan konteks Indonesia. Analisis data dilakukan melalui sintesis hermeneutis dengan triangulasi lintas-tradisi (Reformed, ekumenis, Pentakostal-Karismatik) untuk memastikan kerangka yang dibangun memiliki daya jelajah lintas-konteks denominasional, sekaligus berakar kuat pada konteks Indonesia yang plural.

## PEMBAHASAN

### Genealogi Diakonia Transformatif: Membongkar Reduksi Karitatif

Pembacaan dominan atas *diakonia* dalam tradisi gerejawi Indonesia berakar pada terjemahan Lutheran abad ke-19 yang menyamakannya dengan “pelayanan rendahan” atau “menunggu meja” (Luk. 10:40; Kis. 6:2), suatu interpretasi yang menempatkan diakonia sebagai aktivitas inferior dibandingkan dengan pewartaan dan ibadah. Pembacaan ini, sebagaimana ditelusuri Anni Hentschel dalam analisisnya yang mendalam, sebenarnya merupakan distorsi historiografis yang dilatarbelakangi kepentingan reorganisasi diakonat Protestan pada masa industrialisasi Jerman.<sup>8</sup> Konsekuensi konseptualnya berlanjut hingga kini: ketika Gereja-gereja Indonesia berbicara tentang “diakonia”, asumsi yang muncul adalah aksi karitatif, yaitu memberi sesuatu kepada yang membutuhkan, dengan struktur asimetris yang begitu saja diterima.

John N. Collins, melalui penelitian filologisnya yang ekstensif terhadap penggunaan *diakonia* dalam sumber-sumber Yunani klasik, Yahudi-Helenistik, dan Perjanjian Baru, telah menggeser secara fundamental pemahaman ini. Diakonia, dalam pembacaan Collins, lebih tepat dipahami sebagai pengutusan dengan mandat dan otoritas dari pengutus, yang membawa beban representatif.<sup>9</sup> Implikasinya signifikan: diakon bukan pelayan tingkat rendah, melainkan utusan yang berbicara dan bertindak atas nama pihak yang mengutus. Dalam konteks teologi Perjanjian Baru, hal ini menempatkan diakonia gereja sebagai partisipasi langsung dalam misi Trinitarian, di mana gereja diutus ke dunia sebagaimana Bapa mengutus Anak (Yoh. 20:21).

Pergeseran konseptual ini memicu serangkaian rekonstruksi teologis lanjutan. Kjell Nordstokke dan para teolog Federasi Lutheran Sedunia merumuskan “diakonia yang membebaskan”, yaitu diakonia yang tidak berhenti pada pemberian bantuan, melainkan menempatkan akar struktural penderitaan sebagai objek analisis dan tindakan.<sup>10</sup> Stephanie Dietrich dan rekan-rekannya memperluas perspektif ini dengan menempatkan diakonia sebagai “praksis sosial Kristiani” yang melibatkan advokasi, pengorganisasian komunitas, dan transformasi struktural, bukan hanya respons karitatif terhadap kebutuhan mendesak.<sup>11</sup> Rumusan ini menghubungkan diakonia secara langsung dengan tradisi teologi pembebasan Amerika Latin tanpa kehilangan pijakan biblis-eksegetisnya.

Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini sebenarnya telah lama disuarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui konsep “diakonia transformatif” yang dibedakan dari “diakonia karitatif” dan “diakonia reformatif.” Diakonia transfor-

<sup>8</sup> Anni Hentschel, *Diakonia im Neuen Testament: Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2007), 14–20.

<sup>9</sup> Collins, *Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources*, 195–200.

<sup>10</sup> Nordstokke, *Liberating Diakonia*, 12–17.

<sup>11</sup> Stephanie Dietrich, Knud Jørgensen, Kari Storstein Haug, dan Kjell Nordstokke, eds., *Diakonia as Christian Social Practice: An Introduction* (Oxford: Regnum Books International, 2015), 3–8; 22–27.

matif, dalam rumusan PGI, mengandaikan analisis struktural atas penderitaan dan keberpihakan teologis pada yang tertindas.<sup>12</sup> Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan beberapa kajian kritis, implementasi konsep ini di tingkat sinode dan jemaat lokal kerap kembali ke pola karitatif, mengaplikasikan label “transformatif” pada aktivitas yang strukturnya tetap karitatif. Celah antara wacana resmi dan praksis riil inilah yang menjadi salah satu pintu masuk artikel ini.

Reduksi karitatif memiliki konsekuensi teologis yang lebih dalam daripada sekadar persoalan strategi pelayanan. Sebagaimana diargumentasikan William Cavanaugh dalam konteks yang lebih luas, gereja sebagai rumah sakit lapangan harus mengidentifikasi sebab-sebab struktural luka yang ditangani, bukan sekadar memberikan pem-balut.<sup>13</sup> Tanpa analisis ini, gereja menjadi institusi yang mengabsahkan luka itu sendiri. Diakonia karitatif yang tidak diiringi diakonia struktural berisiko menjadi apa yang oleh teolog pembebasan disebut sebagai penindasan dengan wajah ramah.

Pembacaan ulang ini juga membuka kemungkinan integrasi yang lebih kuat antara dimensi profetis dan dimensi diakonal gereja, yang dalam tradisi gerejawi Indonesia sering dipisahkan secara dikotomis. Walter Brueggemann telah menunjukkan bahwa imajinasi profetis bukanlah aktivitas terpisah dari pelayanan, melainkan modus eksistensi komunitas iman yang melihat realitas dengan visi Allah dan mengartikulasikan ketidak-sesuaian antara apa yang ada dan apa yang seharusnya.<sup>14</sup> Diakonia transformatif, dengan demikian, adalah diakonia yang sekaligus profetis: ia tidak hanya merespons kebutuhan, tetapi juga mengartikulasikan kritik atas struktur yang melahirkan kebutuhan itu.

Implikasi epistemik dari genealogi ini bagi konteks Indonesia cukup luas. Pertama, diakonia tidak dapat lagi dipahami sebagai cabang tersier pelayanan gereja yang dikerjakan oleh divisi tertentu, melainkan sebagai gramatika dasar eksistensi seluruh komunitas iman. Kedua, kepemimpinan Kristiani tidak dapat dipisahkan dari fondasi diakonal ini; setiap aktivitas kepemimpinan harus diuji berdasarkan kontribusinya terhadap pemberdayaan komunitas. Ketiga, paradigma diakonia transformatif menuntut keterbukaan dialogis dengan ilmu-ilmu sosial, khususnya analisis struktural ketimpangan, tanpa kehilangan integritas teologisnya. Tiga implikasi inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya.

### **Kepemimpinan Kristiani sebagai Modus Diakonal**

Pergeseran genealogis di atas menuntut rekonstruksi paralel atas konsep kepemimpinan Kristiani. Selama beberapa dekade terakhir, dua model dominan telah mewarnai literatur kepemimpinan gereja di Indonesia: kepemimpinan transformasional Burns-Bass<sup>15</sup> dan kepemimpinan hamba Greenleaf.<sup>16</sup> Keduanya telah memberikan kontribusi penting, namun keduanya juga mengandung keterbatasan teologis yang harus diidentifikasi dengan

---

<sup>12</sup> Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, *Keputusan Sidang Raya XIV PGI: Dokumen Keesaan Gereja* (Jakarta: PGI, 2014), 67–71.

<sup>13</sup> William T. Cavanaugh, *Migrations of the Holy: God, State, and the Political Meaning of the Church* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), 47–51.

<sup>14</sup> Walter Brueggemann, *The Prophetic Imagination*, edisi ke-2 (Minneapolis: Fortress Press, 2001), 3–7; 115–119.

<sup>15</sup> James MacGregor Burns, *Leadership* (New York: Harper & Row, 1978), 19–20; Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Transformational Leadership*, edisi ke-2 (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), 3–5.

<sup>16</sup> Robert K. Greenleaf, *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*, edisi ke-25 (New York: Paulist Press, 2002), 27–30.

jujur sebelum dikonstruksi ulang secara diakonal. Tanpa identifikasi ini, adopsi tetap berlangsung secara mentah, dan apa yang diklaim sebagai kepemimpinan Kristiani sesungguhnya tidak lebih dari kepemimpinan korporat yang dibungkus retorika Alkitabiah.

Model transformasional Burns-Bass, meskipun secara permukaan kompatibel dengan bahasa pertobatan dan pembaruan, mengandung asumsi antropologis instrumental yang problematis.<sup>17</sup> Pemimpin diposisikan sebagai agen yang “mentransformasi” pengikut menuju cita-cita yang lebih tinggi, sementara pengikut tetap menjadi objek transformasi. Asumsi vertikal-searah ini bertentangan dengan logika perikoretis Trinitas yang menempatkan relasi pengasih timbal balik sebagai pola eksistensi ilahi yang harus tercermin dalam komunitas iman. Veli-Matti Kärkkäinen mengingatkan bahwa pengasih antarpribadi ilahi dalam Trinitas adalah pengasih yang setara dan saling memberdayakan, bukan model di mana satu pribadi “mentransformasi” pribadi yang lain.<sup>18</sup>

Kepemimpinan hamba Robert Greenleaf sekilas tampak lebih kompatibel secara teologis karena meminjam citra hamba yang kuat dalam Perjanjian Baru. Namun, model ini juga mengandung keterbatasan signifikan: ia tetap mengandaikan kerangka kepemimpinan formal di mana pemimpin hamba adalah sosok individual yang “melayani” komunitas, sementara komunitas tetap menjadi penerima layanan. Padahal, dalam gramatika diakonal Perjanjian Baru sebagaimana dibaca ulang Collins, *diakonia* adalah modus pengutusan kolektif komunitas, bukan atribut individual seorang pemimpin.<sup>19</sup> Kepemimpinan hamba, dengan demikian, masih bekerja dalam paradigma individualisme heroik, sekadar dengan retorika yang lebih lembut.

Modus diakonal yang dikonstruksi dalam artikel ini menggeser fokus dari karakter individual pemimpin menuju ekologi relasional komunitas. Kepemimpinan Kristiani sebagai modus diakonal tidak terutama bertanya, “Bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap?” melainkan, “Bagaimana komunitas iman bersama-sama menjalankan pengutusan profetisnya?” Dalam kerangka ini, pemimpin bukan agen yang berdiri di atas komunitas, melainkan partisipan yang ikut memikul beban representatif komunitas dalam menjawab panggilan ilahi. Andrew Root menyebut pergeseran ini sebagai perpindahan dari pemimpin sebagai pelaku menjadi pemimpin sebagai saksi yang menunjuk pada karya Allah yang sudah lebih dulu hadir.<sup>20</sup>

Prinsip kenotik (Flp. 2:5–11) memberikan gramatika kristologis bagi modus diakonal ini. Kenosis bukan sekadar tindakan moral kerendahan hati, melainkan prinsip ontologis tentang bagaimana Allah memilih untuk hadir dan bertindak di dunia melalui pengosongan diri yang justru memberdayakan yang lain.<sup>21</sup> Kepemimpinan diakonal mengikuti pola kenotik ini: pemimpin tidak menambah dirinya dengan otoritas, tetapi mengosongkan dirinya untuk memberi ruang bagi pertumbuhan dan agensi komunitas. Ini bertolak belakang dengan pemimpin transformasional klasik yang justru memperkuat dirinya untuk dapat menginspirasi pengikut.

---

<sup>17</sup> Burns, *Leadership*.

<sup>18</sup> Veli-Matti Kärkkäinen, *The Trinity: Global Perspectives* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2007), 118–122.

<sup>19</sup> Greenleaf, *Servant Leadership*.

<sup>20</sup> Andrew Root, *The Pastor in a Secular Age: Ministry to People Who No Longer Need a God* (Grand Rapids: Baker Academic, 2019), 215–218.

<sup>21</sup> Moltmann, *The Trinity and the Kingdom*, 118–122.

Dalam konteks praksis Indonesia, modus diakonal ini memiliki implikasi konkret bagi struktur penatalayanan gereja. Pertama, tuntutan desentralisasi proses pengambilan keputusan dari konsentrasi pada gembala atau majelis pusat menuju partisipasi komunitas yang lebih luas. Kedua, kritik kultur penggembalaan yang melahirkan ketergantungan jemaat, di mana pertumbuhan rohani diukur dari seberapa setia jemaat mengikuti arahan pemimpin, bukan dari seberapa berdaya jemaat dalam mengambil tanggung jawab teologis dan publik. Ketiga, penuntutan pelatihan kepemimpinan yang berorientasi pada pembentukan komunitas, bukan pembentukan pemimpin individual.

Implikasi terjauh dari konstruksi ini adalah pergeseran fundamental dalam memahami otoritas. Otoritas dalam modus diakonal bukan otoritas yang dimiliki pemimpin atas komunitas, melainkan otoritas yang muncul dari kesetiaan pada pengutusan ilahi dan yang dilegitimasi oleh komunitas yang mengenali kesaksian pemimpin sebagai autentik. Letty Russell, dalam tradisi feminis-eklesiologis, telah menyebut ini sebagai “otoritas dalam komunitas,” otoritas yang bersifat relasional, dialogis, dan akuntabel kepada komunitas yang dilayani.<sup>22</sup> Indonesia, dengan tradisi musyawarah yang kuat dalam budaya lokal, sebenarnya memiliki sumber daya kultural yang dapat memperkaya konstruksi otoritas diakonal ini, asalkan tradisi tersebut dimurnikan dari distorsi patriarkal dan oligarkis yang juga mewarnainya.

### **Pemberdayaan Komunitas: Dari Karitatif ke Struktural**

Konsep pemberdayaan dalam wacana pengembangan komunitas memiliki sejarah panjang yang melintasi disiplin sosiologi, ilmu politik, dan teologi pembebasan. Dalam tradisi teologi pembebasan Amerika Latin, pemberdayaan dipahami sebagai penyadaran yang membawa komunitas dari posisi objek penindasan menjadi subjek sejarah, mampu membaca realitas mereka sendiri, menganalisis sebab-sebab struktural penderitaan, dan bertindak secara transformatif.<sup>23</sup> Pemberdayaan dalam pengertian ini bukan transfer kemampuan dari pihak luar kepada komunitas, melainkan pembebasan agensi yang sudah ada dalam komunitas, namun terhambat oleh struktur yang menindas.

Pemahaman ini sangat berbeda dari paradigma “pemberian bantuan” yang masih dominan dalam praksis diakonal banyak gereja Indonesia. Dalam paradigma karitatif, gereja sebagai “yang memiliki” memberikan kepada “yang kekurangan.” Struktur asimetris ini tidak hanya mengabsahkan ketidaksetaraan, tetapi juga melumpuhkan agensi penerima bantuan. Robert Lupton, dalam analisis kritisnya, menunjukkan bagaimana bantuan filantropis tanpa analisis struktural sering kali memperdalam ketergantungan dan merusak kapasitas komunitas untuk berdaya sendiri.<sup>24</sup> Diakonia transformatif bertentangan diametral dengan kerangka ini.

Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang dikembangkan John McKnight dan John Kretzmann menawarkan kerangka praksis yang dapat berdialog produktif dengan teologi diakonal. Pendekatan ini memulai pendampingan komunitas bukan dari inventarisasi kekurangan, melainkan dari identifikasi aset: talenta, jaringan,

<sup>22</sup> Letty M. Russell, *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1993), 45–50.

<sup>23</sup> Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, terj. Myra Bergman Ramos, edisi ke-30 (New York: Continuum, 2000), 48–52.

<sup>24</sup> Robert D. Lupton, *Toxic Charity: How Churches and Charities Hurt Those They Help (And How to Reverse It)* (New York: HarperCollins, 2011), 3–8.

sumber daya kultural, dan modal sosial yang sudah dimiliki komunitas.<sup>25</sup> Pendekatan ini secara teologis kompatibel dengan doktrin citra Allah yang menegaskan martabat dan kreativitas setiap manusia, termasuk komunitas yang secara ekonomi marjinal. Dibutuhkan komunitas bukan terutama bantuan dari luar, melainkan ruang dan dukungan untuk mengaktifkan aset-aset internalnya.

Dimensi struktural dari pemberdayaan menjadi krusial ketika analisis bergerak dari level mikro ke level makro. Komunitas yang berusaha berdaya sering menghadapi struktur yang menindas: kebijakan negara, sistem ekonomi global, relasi gender patriarkal, dan ketimpangan agraria, yang tidak dapat diubah hanya dengan mobilisasi internal komunitas. Di sinilah dimensi advokasi struktural menjadi bagian integral dari diakonia transformatif. Mary Doak, dalam konstruksi “gereja publiknya,” menempatkan advokasi struktural sebagai panggilan eklesiologis primer, bukan aktivitas opsional bagi gereja yang berorientasi sosial.<sup>26</sup> Gereja yang tidak mengangkat suara terhadap struktur yang menindas sesungguhnya tidak menjalankan panggilan diakonalnya, terlepas dari seberapa aktif aksi karitatifnya.

Kerangka kapabilitas Amartya Sen, meskipun berasal dari tradisi ekonomi-filsafat sekuler, menyediakan kosakata analitis yang berguna bagi teologi pemberdayaan. Sen menggeser fokus pengukuran kesejahteraan dari “apa yang dimiliki” ke “apa yang dapat dilakukan dan menjadi”, yaitu kebebasan substantif untuk menjalani hidup yang dihargai.<sup>27</sup> Dialog teologis dengan kerangka Sen menempatkan pemberdayaan bukan sebagai peningkatan kepemilikan, tetapi sebagai pembebasan kapabilitas. Dalam horizon eskatologis Kristiani, hal ini terhubung dengan visi damai sejahtera yang menyeluruh, yaitu keutuhan hidup yang tidak hanya berarti ketiadaan penderitaan, tetapi juga ruang penuh bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya di hadapan Allah dan sesama.

Praksis pemberdayaan struktural ini telah dijalankan, meskipun belum cukup diteorikan, oleh berbagai gerakan akar rumput Kristiani di Indonesia. Dari pendampingan masyarakat adat di Kalimantan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat Kristiani, advokasi buruh migran oleh jaringan pastoral, hingga gerakan ekoteologi di komunitas pesisir Maluku dan Papua, praksis-praksis ini telah menunjukkan pola diakonia yang tidak berhenti pada karitatif.<sup>28</sup> Tantangan akademisnya adalah membingkai praksis-praksis ini secara teologis dengan kerangka yang memadai, sehingga ia tidak hanya menjadi praktik terbaik dalam pelaporan organisasi, tetapi juga menjadi sumber refleksi teologis yang lebih luas.

Implikasi paradigmatik dari pergeseran ini bagi konsep kepemimpinan diakonal cukup luas. Pemimpin diakonal bukanlah figur yang membawa solusi dari luar kepada komunitas, melainkan partisipan yang membantu komunitas mengenali agensinya sendiri, menganalisis struktur yang melingkupinya, dan mengorganisir tindakan kolektif.

---

<sup>25</sup> John P. Kretzmann dan John L. McKnight, *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets* (Evanston, IL: Asset-Based Community Development Institute, Northwestern University; Chicago: ACTA Publications, 1993), 1–6; 25–29.

<sup>26</sup> Mary Doak, *A Prophetic, Public Church: Witness to Hope Amid the Global Crises of the Twenty-First Century* (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2020), 34–38.

<sup>27</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999), 74–76; 87–89.

<sup>28</sup> Nita Abia Salabay and Agustinus Marthinus Luther Batlajery, “Menakar Budaya, Meramu Dogma: Sumbangan Nilai Budaya bagi Dogma Gereja,” *Indonesian Journal of Theology* 13, no. 1 (2025): 25–44.

Luke Bretherton, dalam karyanya tentang pengorganisasian komunitas dalam tradisi teologi politik, menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi komunitas berbasis iman adalah kepemimpinan yang menumbuhkan pemimpin baru, bukan kepemimpinan yang membangun ketergantungan.<sup>29</sup> Itulah gramatika kepemimpinan diakonal yang sesungguhnya: keberhasilan diukur dari berkurangnya ketergantungan komunitas pada pemimpin, bukan sebaliknya.

### Horizon Eklesiologi Publik: Diakonia dan Ruang Publik Indonesia

Praksis diakonia transformatif yang memberdayakan komunitas pada akhirnya bergerak melampaui batas internal gereja menuju ruang publik. Teologi publik kontemporer, sebagaimana dikembangkan oleh David Tracy, Sebastian Kim, Elaine Graham, dan Heinrich Bedford-Strohm, telah berargumen bahwa teologi tidak dapat dikurung dalam batas-batas eklesial; ia harus mampu berbicara secara bermakna di ruang publik yang plural.<sup>30</sup> Dalam konteks Indonesia yang sangat plural secara religius dan kultural, tantangan ini tidak hanya teoretis tetapi juga praksis: bagaimana gereja menjalankan diakonia transformatifnya tanpa terjebak dalam eksklusivisme religius yang justru mengasingkan komunitas plural di sekitarnya?

Konsep “gereja publik” sebagaimana dikembangkan oleh Mary Doak menawarkan kerangka yang relevan. Gereja publik bukan gereja yang tampil di ruang publik dengan agenda partisan, melainkan gereja yang menjalankan eksistensinya sebagai partisan dalam pembentukan kebaikan bersama yang lebih luas dari batas keanggotaannya.<sup>31</sup> Dalam horizon ini, diakonia transformatif tidak berhenti pada pemberdayaan komunitas internal, melainkan ditujukan pada keutuhan komunitas politik yang lebih luas, termasuk yang tidak beragama Kristen. Hal ini menempatkan diakonia sebagai modus partisipasi gereja dalam kehidupan publik bersama.

Miroslav Volf, melalui kerangka “demi kehidupan dunia”, memberikan rumusan yang berguna tentang bagaimana iman Kristen berkontribusi pada kehidupan publik tanpa harus menjadi agama negara atau, sebaliknya, menarik diri ke ruang privat.<sup>32</sup> Volf membedakan antara iman sebagai sistem keyakinan dan iman sebagai modus eksistensi. Modus eksistensi memungkinkan kontribusi publik yang lebih dalam karena ia tidak bersaing dengan agama-agama lain pada level klaim eksklusif, melainkan menawarkan praktik-praktik yang berkontribusi pada kebaikan bersama. Diakonia transformatif, dalam kerangka ini, adalah praktik primer iman sebagai modus eksistensi.

Konteks Indonesia menyajikan tantangan dan peluang yang khas. Pancasila sebagai dasar negara menyediakan ruang konstitusional bagi partisipasi religius dalam kehidupan publik. Namun, ruang ini tidak otomatis terbuka; ia harus diisi melalui praksis yang konsisten dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan dominasi religius. Diakonia transformatif yang ditujukan pada keutuhan komunitas plural Indonesia harus mengembangkan kosakata yang dapat diterjemahkan secara lintas iman, sambil tetap berakar pada partikularitas kristologisnya. Ini bukan kontradiksi: partikularitas yang auten-

<sup>29</sup> Luke Bretherton, *Resurrecting Democracy: Faith, Citizenship, and the Politics of a Common Life* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 87–92.

<sup>30</sup> David Tracy, *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism* (New York: Crossroad, 1981), 14–19.

<sup>31</sup> Doak, *A Prophetic, Public Church*, 44–48; 78–82.

<sup>32</sup> Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids: Brazos Press, 2011), 72–77.

tik justru menjadi kontribusi yang khas pada keberagaman, bukan ancaman terhadap keberagaman.

Salah satu praksis yang relevan dalam konteks ini adalah keterlibatan dalam pengorganisasian komunitas lintas iman. Tradisi pengorganisasian komunitas yang dikembangkan oleh Saúl Alinsky dan kemudian ditransformasi secara teologis oleh berbagai tradisi gereja di Amerika Serikat, menawarkan model partisipasi publik yang berakar pada komunitas iman namun tidak eksklusif terhadap pihak luar.<sup>33</sup> Luke Bretherton menunjukkan bagaimana pengorganisasian komunitas dapat menjadi bentuk modern politik kebangkitan yang menghidupkan agensi komunitas tertindas dalam ruang publik tanpa mengorbankan integritas teologis.<sup>34</sup> Di Indonesia, praksis serupa telah dijalankan oleh berbagai jaringan ekumenis dan lintas iman.

Namun, horizon eklesiologi publik juga mengandung risiko serius yang harus diwaspadai. Pertama, risiko kooptasi politik: gereja yang berusaha relevan di ruang publik dapat terjebak menjadi instrumen kekuasaan, baik melalui aliansi politis pragmatis maupun melalui adopsi diam-diam ideologi penguasa. Kedua, risiko komodifikasi diakonia: program-program pemberdayaan komunitas dapat berubah menjadi citra kelembagaan atau alat penggalangan dana, kehilangan substansinya sebagai pengutusan profetis. Ketiga, risiko teknokratisasi: pendekatan struktural yang dimaksudkan untuk memberdayakan dapat berubah menjadi manajemen sosial yang justru mengaburkan agensi komunitas. Kewaspadaan terhadap ketiga risiko ini harus terintegrasi dalam refleksi teologis yang berkelanjutan.

Konstruksi diakonia transformatif yang ditawarkan artikel ini, dengan demikian, tidak berhenti pada level konseptual, tetapi terus terbuka pada evaluasi praksis. Kepemimpinan Kristiani sebagai modus diakonal yang memberdayakan komunitas dalam horizon eklesiologi publik adalah proyek terbuka yang menuntut refleksi teologis berkelanjutan, sensitivitas terhadap dinamika kuasa, dan kesetiaan pada Trinitas perikoretis yang menjadi gramatika dasarnya. Willie James Jennings, dalam refleksinya tentang pembentukan teologis di era pascakolonial, mengingatkan bahwa pembentukan komunitas iman yang autentik selalu merupakan pendidikan untuk berbagi tempat dalam dunia yang luka.<sup>35</sup> Diakonia transformatif Indonesia, jika ingin menjadi autentik, harus menjadi pendidikan berkelanjutan untuk berbagi tempat dengan komunitas plural Indonesia, dengan kesetiaan teologis yang kokoh dan keterbukaan dialogis yang tulus.

## KESIMPULAN

Diakonia transformatif sebagai gramatika kepemimpinan Kristiani menawarkan jalan keluar dari dua ekstrem yang mendominasi wacana kepemimpinan di Gereja-gereja Indonesia: adopsi mentah model manajerial korporat berbalut retorika Alkitabiah, dan reduksi diakonia menjadi aksi karitatif yang melumpuhkan agensi komunitas. Dengan berakar pada pembacaan ulang diakonia sebagai pengutusan profetis, kepemimpinan Kristiani direkonstruksi bukan sebagai posisi otoritas individual, melainkan sebagai mo-

---

<sup>33</sup> Saúl D. Alinsky, *Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals* (New York: Random House, 1971), 3–10.

<sup>34</sup> Luke Bretherton, *Resurrecting Democracy: Faith, Citizenship, and the Politics of a Common Life* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 47–55.

<sup>35</sup> Willie James Jennings, *After Whiteness: An Education in Belonging* (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 6–10; 144–148.

dus partisipasi kolektif dalam misi Trinitarian yang menempatkan komunitas sebagai subjek transformasi.

Implikasi praksis dari kerangka ini mencakup empat hal. Pertama, pembentukan kepemimpinan di seminari perlu direorientasi dari pembentukan pemimpin individual menuju pembentukan komunitas yang berdaya dan akuntabel. Kedua, struktur penatalayanan gereja perlu didesentralisasi agar komunitas berpartisipasi lebih luas dalam pengambilan keputusan. Ketiga, program diakonia perlu diuji berdasarkan kontribusinya pada pemberdayaan struktural, bukan volume bantuan yang didistribusikan. Keempat, gereja perlu mengembangkan kapasitas teologis untuk berpartisipasi bermakna dalam ruang publik plural Indonesia tanpa terjebak dalam eksklusivisme religius maupun ko-optasi politis. Sebagai konstruksi teologis-konseptual, artikel ini membutuhkan elaborasi empiris lebih lanjut melalui studi kasus konkret dan dialog yang lebih intensif dengan tradisi denominasional yang beragam. Pada akhirnya, diakonia transformatif bukanlah formula yang selesai, melainkan proyek berkelanjutan yang menuntut kesetiaan pada relasi trinitaris sebagai sumber sekaligus tujuan akhir seluruh praksis Kristiani.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Persekutuan Antar Sekolah Tinggi Teologi Injili di Indonesia yang telah memberikan hibah untuk saya melakukan penelitian pada Februari 2023; dan artikel ini merupakan luaran dari penelitian tersebut.

## REFERENSI

- Alinsky, Saúl D. *Rules for Radicals: A Practical Primer for Realistic Radicals*. New York: Random House, 1971.
- Bass, Bernard M., dan Ronald E. Riggio. *Transformational Leadership*. Edisi ke-2. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
- Bretherton, Luke. *Resurrecting Democracy: Faith, Citizenship, and the Politics of a Common Life*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Brueggemann, Walter. *The Prophetic Imagination*. Edisi ke-2. Minneapolis: Fortress Press, 2001.
- Burns, James MacGregor. *Leadership*. New York: Harper & Row, 1978.
- Cavanaugh, William T. *Migrations of the Holy: God, State, and the Political Meaning of the Church*. Grand Rapids: Eerdmans, 2011.
- Collins, John N. *Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Dietrich, Stephanie, Knud Jørgensen, Kari Storstein Haug, dan Kjell Nordstokke, eds. *Diakonia as Christian Social Practice: An Introduction*. Oxford: Regnum Books International, 2015.
- Doak, Mary. *A Prophetic, Public Church: Witness to Hope Amid the Global Crises of the Twenty-First Century*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2020.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. Diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. Edisi ke-30. New York: Continuum, 2000.
- Greenleaf, Robert K. *Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness*. Edisi ke-25. New York: Paulist Press, 2002.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation: History, Politics, and Salvation*. Diterjemahkan oleh Sister Caridad Inda dan John Eagleson. Maryknoll: Orbis Books, 1973.

- Hentschel, Anni. *Diakonia im Neuen Testament: Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007.
- Jennings, Willie James. *After Whiteness: An Education in Belonging*. Grand Rapids: Eerdmans, 2020.
- Kärkkäinen, Veli-Matti. *The Trinity: Global Perspectives*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2007.
- Kretzmann, John P., dan John L. McKnight. *Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community's Assets*. Evanston, IL: Asset-Based Community Development Institute, Northwestern University; Chicago: ACTA Publications, 1993.
- Lupton, Robert D. *Toxic Charity: How Churches and Charities Hurt Those They Help (And How to Reverse It)*. New York: HarperCollins, 2011.
- Mokodompit, Limi. *Dinamika Industrialisasi: Transformasi Kepemimpinan dalam Masyarakat Adat Papua (Studi Kasus: Suku Kamoro Mimika, Provinsi Papua)*. Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2024.
- Moltmann, Jürgen. *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*. Diterjemahkan oleh Margaret Kohl. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Nordstokke, Kjell, ed. *Liberating Diakonia*. Trondheim: Tapir Academic Press, 2011.
- Osmer, Richard R. *Practical Theology: An Introduction*. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. *God Remembers: Towards a Theology of Remembrance as a Basis of Reconciliation in Communal Conflict*. Amsterdam: VU University, 2012.
- Root, Andrew. *Faith Formation in a Secular Age: Responding to the Church's Obsession with Youthfulness*. Grand Rapids: Baker Academic, 2017.
- Root, Andrew. *The Pastor in a Secular Age: Ministry to People Who No Longer Need a God*. Grand Rapids: Baker Academic, 2019.
- Russell, Letty M. *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1993.
- Salabay, Nita Abia, dan Agustinus Marthinus Luther Batlajery. "Menakar Budaya, Meramu Dogma: Sumbangan Nilai Budaya bagi Dogma Gereja." *Indonesian Journal of Theology* 13, no. 1 (2025): 25–44.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
- Tracy, David. *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism*. New York: Crossroad, 1981.
- Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
- Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. *Keputusan Sidang Raya XIV PGI: Dokumen Keesaan Gereja*. Jakarta: PGI, 2014.